

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 menyebabkan terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah yang dari awalnya hanya sekedar administratif menjadi pengelolaan yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan barang yang di beli atau diperoleh dari beban APBD, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern di harapkan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stake holder lainnya kepada pemerintah untuk pengeloaan aset daerah.

Barang atau Aset Milik Daerah Menurut (Mahmudi, 2010) adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pengelolaan aset daerah mencakup lingkungan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, penelitian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Permendagri No 19 Tahun 2016).

Realita di lapangan menunjukkan banyak kasus yang sebenarnya dimulai dari salah kelola dan salah urus masalah aset akan berdampak kerugian yang tidak sedikit, banyak sekali instansi pemerintah maupun swasta yang masih menganggap hanya instrumen pengelolaan daftar aset saja. Apabila pengelolaan aset tidak dilakukan secara maksimal maka tidak akan teridentifikasi dengan jelas, hingga sulit untuk mengetahui layak tidaknya aset tersebut. Pada dasarnya, manajemen aset di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu UUNo.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditindaklanjuti PP No.27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 85 menyebutkan agar dilakukan inventarisasi atas BMN/D (barang milik 6 negara/daerah), khusus berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di kementerian/lembaga minimal sekali dalam 5 tahun.

Masalah yang banyak terjadi di dalam 10 artikel jurnal dan skripsi yang dipilih sebagai sumber data dalam penelitian *literature review* ini adalah optimalisasi pengelolaan aset pada sistem informasi manajemen aset rumah sakit. Ditemukan pada penelitian (Nasution E. , 2015) bahwa di rumah sakit untuk pengelolaan pada manajemen aset masih banyak yang belum optimal dan pemanfaatan pada sistem informasi rumah sakit juga masih belum bisa berjalan dengan baik. Seharusnya dengan adanya sistem informasi manajemen aset dari mulai pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, dan penghapusan bisa meminimalisir terjadinya kehilangan aset, karna sudah dimonitoring oleh sistem informasi manajemen aset dirumah sakit.

Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan bisa sebagai masukan untuk peningkatan pada pengelolaan manajemen aset rumah sakit agar pengelolaan kedepannya bisa lebih baik lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan Manajemen Aset dan Sistem Informasi di Rumah Sakit.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi pengelolaan Manajemen Aset dan Sistem Informasi di Rumah Sakit Tahun 2020.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi manajemen aset di rumah sakit.
2. Mengidentifikasi sistem informasi di rumah sakit.
3. Mengidentifikasi optimalisasi aset dirumah sakit.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk meneliti tugas akhir, skripsi sebagaimana memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Rumah Sakit di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo.

1.4.2 Manfaat Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi yang positif bagi Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang baik.

1.4.3 Manfaat Penelitian Bagi Stikes Yayasan RS Dr. Soetomo

Sebagai bahan referensi pembelajaran serta meningkatkan wawasan, pengetahuan, hardskill, dan softskill mahasiswa sehingga dapat menghasilkan lulusan mahasiswa yang berkompeten di bidang kesehatan.